



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2023



 0811-7858-001

 BARISTANDPALEMBANG.KEMENPERIN@GMAIL.COM

 JL. PERINDUSTRIAN II NO.12 PALEMBANG

 WWW.BSPJIPALEMBANG.KEMENPERIN.GO.ID

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

2023

A. KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renkin) adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi target kinerja yang diharapkan oleh suatu Unit Kerja pada satu tahun tertentu dan disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen rencana jangka menengah suatu organisasi. Rencana Kinerja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki tujuan untuk membangun manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Kinerja 2023 disusun pada awal tahun sebelum tahun anggaran berjalan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, serta berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 maka dilakukan revaluasi kembali terhadap renkin TA.2023 terkait perubahan indikator-indikator kinerja yang masih berorientasi output dan belum memenuhi prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based (SMART).

Semoga Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2023 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Palembang, Desember 2022
Kepala BSPJI Palembang

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line across the middle.

Syamdian

DAFTAR ISI

A.	KATA PENGANTAR	1
B.	DAFTAR ISI	3
D.	TABEL GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	PENDAHULUAN.....	6
A.	LATAR BELAKANG	6
B.	MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
C.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	8
D.	STRUKTUR ORGANISASI.....	9
E.	RUANG LINGKUP	10
BAB II	PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	11
A.	HASIL-HASIL PEMBANGUNAN	11
1.	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI	11
2.	LAYANAN JASA TEKNIK INDUSTRI	13
B.	ARAH PEMBANGUNAN.....	23
BAB III	RENCANA KINERJA.....	25
A.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
B.	SASARAN	25
C.	INDIKATOR KINERJA.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Output Pelaksanaan Kegiatan BSPJI Palembang Tahun 2023	26
Tabel 4. 1. Target Rencana Kinerja TA.2023	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BSPJI Palembang	9
Gambar 1. 2 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang .	14
Gambar 1. 3 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang	15
Gambar 1. 4 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang	16
Gambar 1. 5 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang.....	18
Gambar 1. 6 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang	19
Gambar 1. 7 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.....	20
Gambar 1. 8 Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultasi	22

A. LATAR BELAKANG

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis di Kementerian Perindustrian yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri setiap tahunnya telah menetapkan sasaran dan program Satuan Kerja untuk Jangka Menengah

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, Presiden mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategis yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan. RENSTRA organisasi kemudian diturunkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian diaplikasikan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Sebagai Penjabaran lebih lanjut untuk perencanaan Tahun 2021 yang merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan maka diperlukan Rencana Kinerja. Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Baristand Industri Palembang adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 150/MInd/Per/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang adalah sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi tindak lanjut hambatan dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya.
2. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang.

3. Kebutuhan layanan jasa di wilayah kerja BSPJI Palembang (Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung).
4. Hasil koordinasi dengan pemerintah daerah
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
6. Perluasan ruang lingkup Layanan teknis sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategis yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan. RENSTRA organisasi kemudian diturunkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian diaplikasikan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023 merupakan uraian dari sasaran kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023 dengan maksud dan bertujuan untuk :

1. Sebagai dasar penetapan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian;

2. Sebagai gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023
3. Sebagai dasar dalam pengukuran capaian kinerja baik sasaran, program maupun kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2023;
4. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BSPJI Palembang
5. Sebagai bahan evaluasi diakhir Tahun Anggaran 2023 tentang kesesuaian perencanaan dengan pencapaian kinerja

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menyelenggarakan fungsi:

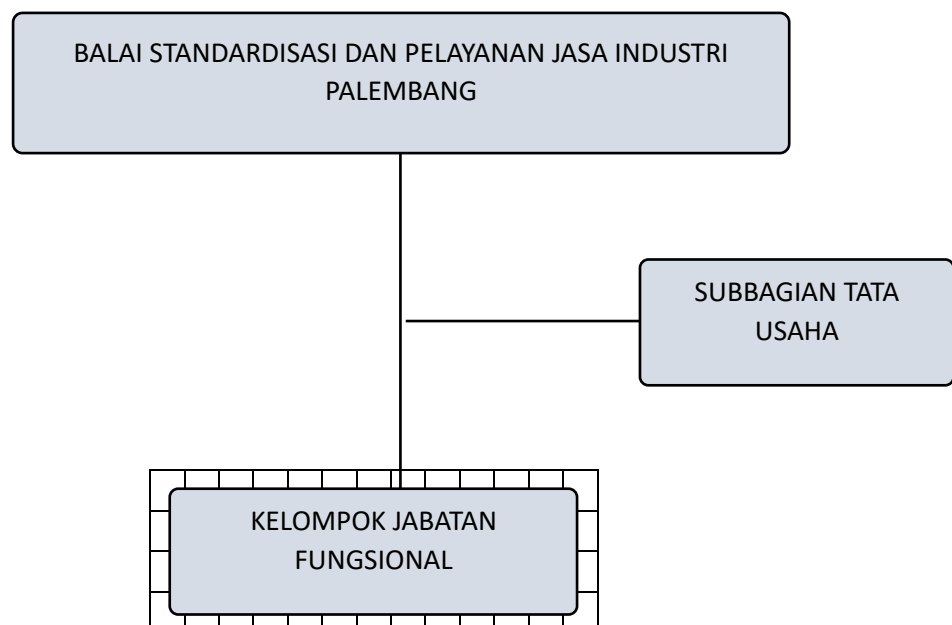
1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

Berdasarkan Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
2. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2023 meliputi :

1. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan turunan dari Rencana Kinerja Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian sebagai Unit Eselon I;
2. Rencana Kinerja tahun 2023 sesuai dengan Draft Renstra 2021-2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
3. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja merupakan kegiatan utama yang merupakan bagian dari tupoksi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
4. Pelaksanaan Rencana Kinerja dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

BAB II PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. HASIL-HASIL PEMBANGUNAN

Tugas pokok Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

1. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Hasil kolaborasi yang berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe maupun bentuk pengembangan industri lain seperti problem solving industri harus dapat diukur outcome-nya. Oleh karena itu, keberhasilan kolaborasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Agar tercapai pengembangan industri yang lebih efektif, maka diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, industri ataupun instansi lainnya,

Tahun 2022:

- 2) IKM PD Sahang Mas yang berlokasi di kota Palembang sebagai tenan BSPJI Palembang dengan dengan kegiatan berupa konsultasi teknologi 4.0 dengan pemasangan sensor suhu dan temperatur realtime pada gudang penyimpanan di Industri kopi PD Sahang Mas;
- 3) IKM Ponpes Darussalam di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai tenan BSPJI Palembang dengan kegiatan Peningkatan, Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan sertifikasi Produk untuk Industri AMDK;
- 4) BPU Universitas Sriwijaya sebagai tenan BSPJI Palembang dalam rangka Peningkatan, Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan sertifikasi Produk

untuk Industri AMDK;

- 5) CV Boga Utama Palembang sebagai tenan BSPJI Palembang dalam rangka peningkatan, penerapan sistem mutu dan keamanan pangan pada industry makanan.
 - 6) IKM Raja Vegan yang terletak di Kota Palembang, bergerak dibidang industri makanan dan minuman, sebagai tenan BSPJI Palembang melalui program PINOTI mendapat bantuan dari BSPJI Palembang penerapan CPPOB dan desain layout proses produksi, Inovasi desain kemasan produk rendang dan mie, Pengujian produk mie vegan, kerupuk dan rendang sesuai dengan SNI yang relevan.;
 - 7) IKM Dapur Ummi, terletak di Kabupaten Banyuasin, bergerak dibidang industri makanan dan minuman, sebagai tenan BSPJI Palembang melalui program PINOTI mendapat bantuan dari BSPJI Palembang dalam rangka Pendampingan Penerapan CPPOB, Pengembangan Proses Produk, dan Penjajakan ekspor produk;
 - 8) IKM Pempek Cek Ya yang terletak di Kota Palembang, bergerak dibidang industri makanan dan minuman, sebagai tenan BSPJI Palembang melalui program PINOTI mendapat bantuan dari BSPJI Palembang dalam rangka pelaksanaan Pengembangan diversifikasi produk, Rekomendasi teknologi, pengujian produk, dan Bimbingan teknik pemasaran melalui media sosial
 - 9) 8) IKM KPP Rumah Tani Pagaralam, terletak di Kota Pagaralam yang bergerak pada bidang industri Industri Kopi sebagai, tenan BSPJI Palembang mendapatkan program konsultasi dan pendampingan pada bidang Penerapan CPPOB, Pengembangan Proses Produk, dan Penjajakan ekspor produk biji kop

Tahun 2021

- 1) KUD Sekawan Tani
 - Optimalisasi Teknologi untuk peningkatan daya saing produk
 - Percepatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

melalui Program DAPATI untuk pekerjaan Jasa Konsultansi

- Peningkatan efisiensi dan perbaikan kualitas produk karet rumah tangga melalui Disain Formulasi dan Perbaikan Lay Out Produksi

2) PD. Sahang Mas

- Penentuan masa simpan kopi bubuk melalui pengamatan jenis bahan kemasan serta profile roasting dan perubahan sifra kimia kopi robusta dan arabika

3) PT. Shima Prima Utama

- Pembuatan Solid Tyre, Rubber Tips, Teknoogi Pembuatan Ban Tempat Tidur Pasien dan Pengembangan Karet Alam menjadi Armest untuk Kursi

4) PT. Utama Karya Technindo

- Pembuatan Rubber Lagging

Didalam Penerapannya, BSPJI Palembang melaksanakan penerapan dan pengawasan terkait standardisasi industri, melaksanakan optimalisasi pemanfaatan industri dan pendampingan dan konsultasi dibidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri terkait pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi dibidang industri. Adapun kegiatan-kegiatan teknis dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

2. LAYANAN JASA TEKNIK INDUSTRI

1) Pengujian

Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang (LP-080-IDN) sebagai salah satu fasilitas yang memberikan layanan jasa pengujian, baik untuk kepentingan industri maupun umum yang berhubungan dengan industri bahan maupun produk yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). BSPJI Palembang mempunyai beberapa laboratorium antara lain :

- A. Laboratorium Aneka Komoditi
- B. Laboratorium Pencemaran
- C. Laboratorium Mikrobiologi



Gambar 1. 2 *Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang*

2) Kalibrasi Peralatan

BSPJI Palembang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK-259-IDN) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium Kalibrasi BSPJI Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik. Saat ini, kegiatan kalibrasi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan jaminan mutu hasil kegiatan pengukuran maupun pengujian. Kalibrasi menjadi bukti ketertelusuran pengukuran suatu alat ke standar nasional maupun internasional. Serangkaian kegiatan kalibrasi dilakukan untuk peningkatan mutu, menghindari cacat dan meminimalisir penyimpangan hasil produksi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Laboratorium Kalibrasi Balai Standardisasi Pelayanan & Jasa Industri (BSPJI) Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik (seperti pada tabel). Dalam menjamin hasil kalibrasinya, Laboratorium Kalibrasi BSPJI-PAL menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17025:2017. Metode Kalibrasi yang

digunakan adalah mengacu ke standar yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti, KAN Guide, Suplemen-2 KAN, Internasional Standardization for Organization (ISO), Australian Standard (AS) American Society for Testing and Material (ASTM) dan standar lain yang berlaku. Untuk menjamin hasil kalibrasinya, BIPA mengikuti Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Kalibrasi yang kompeten.



Gambar 1. 3 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang

3) Lembaga Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi Produk

LSPro BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSPr-007-IDN. Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSPro BSPJI Palembang) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan SPPT SNI dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2004. LSPro BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada perusahaan

di dalam dan luar negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk sesuai SNI.



Gambar 1. 4 *Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang*

Lembaga Sertifikasi Produk merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI Wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang diberlakukan SNI wajib maka ruang lingkup akreditasi LSPro BSPJI Palembang akan terus berkembang sesuai dengan regulasi pemerintah, baik dari lingkup SNI produk maupun skema sertifikasi. Selain melakukan Sertifikasi Produk yang ada dalam ruang lingkup akreditasi, LSPro BSPJI Palembang juga melakukan kegiatan sertifikasi berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Alur proses skema yang digunakan pada LSPro BSPJI Palembang adalah skema sertifikasi tipe 3, 4, 5 dan skema sertifikasi tipe 1B, 1n.

Kebijakan Mutu LSPro BSPJI Palembang adalah " seluruh personil lembaga sertifikasi produk Balai Riset dan Standardisasi

Industri Palembang secara konsisten menerapkan manajemen sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai sarana memuaskan pelanggan”.

b. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN. LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN.

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (LSSM BSPJI) Palembang mempunyai visi untuk menjadi mitra industri di dalam melaksanakan jaminan mutu dan memelihara kesesuaian. LSSM BSPJI Palembang berkomitmen untuk mengawali keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan operasional dan penerapan sistem manajemen mutu LSSM BSPJI Palembang berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, transparan peta multi lokasi dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.



Gambar 1. 5 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang

Kebijakan mutu LSSM BSPJI Palembang adalah “Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang secara Konsisten Menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 17021-1: 2015 sebagai Sarana Memuaskan Pelanggan”.

- Manajemen LSSM BSPJI Palembang selalu Mengutamakan, Memelihara dan Menerapkan Prinsip Ketidakberpihakan.
- Meningkatkan Kompetensi Manajemen dan Auditor.
- Bertanggung Jawab, Menjaga Kerahasiaan dan Mengembangkan Daya Tanggap dalam Seluruh Kegiatan.
- Menjamin Bahwa Seluruh Personil Mengerti, Memahami dan Menerapkan Kebijakan Mutu.

c. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BIPA) yang telah terakreditasi dengan nomor LSSML-028-IDN , dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Manajemen Lingkungan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang atau disebut LSSML BSPJI Palembang merupakan

lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian.

LSSML BSPJI Palembang melayani sertifikasi sistem manajemen lingkungan mutu SNI ISO 14001:2015 bagi industri yang telah menerapkan SNI ISO 14001:2015. Untuk menjamin kompetensi, LSSML. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.



Gambar 1. 6 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang

Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi sistem manajemen lingkungan, LSSML BIPA berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian, ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, peta multilokasi yang transparan dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.

d. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

LSIH BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk Menteri Perindustrian, dengan Nomor Penunjukan : Nomor 3398 Tahun 2023. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSIH BSPJI) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan Sertifikat Industri Hijau dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2017. LSIH BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan dalam negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen.



Gambar 1. 7 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam efisiensi penggunaan sumber daya alam. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang menerapkan industri hijau maka saat ini ruang lingkup akreditasi LSIH BSPJI Palembang ditambah sesuai dengan kompetensi personil LSIH BSPJI dan ruang lingkup sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24

Tahun 2021, tanggal 10 September 2021. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.

e. Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang yang melayani sertifikasi sistim manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000:2018 bagi industri pangan yang akan menerapkan SNI ISO 22000:2018. Pendirian Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang didirikan sesuai dengan SK Tim Percepatan LSSMKP No. 55 tahun 2022 dan SK Penunjukan Personil Lembaga No.338 Tahun 2022. Saat ini LSSMKP BSPJI Palembang dalam progress pengajuan akreditasi ke KAN.

f. Lembaga SMK3

Pendirian Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSSMK3) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sesuai dengan SK No 337 Tahun 2022

4) Pelatihan dan Konsultasi Teknik

Selain menyediakan jasa layanan sertifikasi & laboratorium pengujian, BSPJI Palembang juga menyediakan jasa konsultasi teknis & pelatihan. Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam dunia industri di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, BSPJI Palembang menyediakan beberapa pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian karyawan .



Gambar 1. 8 Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultasi

BSPJI Palembang juga didukung trainer yang handal dan profesional sehingga dapat membantu para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun pelatihan yang disediakan BSPJI Palembang adalah sebagai berikut ;

- Proses Produksi Pangan
- Pengolahan Kopi
- Pembuatan Produk Karet
- Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 & SNI ISO 9001:2015
- Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000
- Pelatihan HACCP
- Pelatihan Pengujian Kimia, Fisika & Mikrobiologi
- Pelatihan Pengujian Mutu AMDK SNI 3553:2015
- Pelatihan Kalibrasi
- Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC)

Dalam melaksanakan peran strategis, BSPJI Palembang memiliki fasilitas pendukung antara lain Laboratorium Pengujian, Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dan Pusat informasi serta sarana pelatihan .

- 1) Laboratorium Aneka Komoditi
- 2) Laboratorium Pencemaran

- 3) Laboratorium Mikrobiologi
- 4) Pusat Informasi dan Dokumentasi

B. ARAH PEMBANGUNAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, mengamanatkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh

Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua seperti yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015- 2035, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional, Sasaran Strategis, dan indikator pada RPJMN 2020—2024 & Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020—2024 serta kontrak kinerja Menteri Perindustrian. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra Kemenperin juga telah menetapkan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang biasa disebut sebagai

indikator kinerja utama (IKU) disertai target dari masing-masing sasaran strategis.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dalam rangka mendukung tujuan BSKJI, maka BSPJI Palembang menetapkan untuk menjadi penyedia layanan standardisasi dan jasa industri di Standardisasi dan Pelayanan jasa teknis untuk memenuhi kebutuhan industry.

BAB III RENCANA KINERJA

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, BSPJI Palembang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program BSKJI yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen.

B. SASARAN

sasaran Sasaran dalam kurun waktu jangka menengah yang ingin dicapai Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dibagi berdasarkan 4 perspektif :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (**Stakeholder**)
 - Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas.
2. Perspektif Pelanggan (**Costumer**) :
 - Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.
 - Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
3. Perspektif Proses Internal (**Internal process**) :
 - Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
 - Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (**Learn and Growth**) :
 - Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
 - Penguatan Layanan Publik
 - Penguatan Akuntabilitas Organisasi.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, BSPJI Palembang mendapatkan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatannya. Secara umum, berikut ini adalah rencana pelaksanaan output dan

kegiatan BSPJI Palembang pada tahun 2023:

Tabel 3. 1 Output Pelaksanaan Kegiatan BSPJI Palembang Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
6077.AEC.002	Kerja sama
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Penjajakan / Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis
A	Kerjasama Optimalisasi teknologi dengan Industri
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi
6077.AEF.001	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi, Pemanfaatan Teknologi dan layanan Jasa teknis Promosi/Publikasi/temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis
051	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis
A	Penyebaran Informasi Layanan Jasa Teknis
B	Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis
C	Temu Pelanggan Baristand Industri Palembang
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri
6077.BAD.001	Jasa pelayanan Teknis Pengujian
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
A	Layanan Pegujian Laboratorium dab Pengambilan Contoh Uji
6077.BAD.024	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
051	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi
A	Pelaksanaan Layanan Kalibrasi
6077.BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
A	Pelaksanaan Layanan Lembaga Sertifikasi
6077.BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri
A	Pelatihan/ Bimbingan/ Konsultasi Teknis dan Non Teknis
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri

No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)
6077.BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri
A	Paket Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industry di Kabupaten Kuansing
B	Paket Teknologi yang dimanfaatkan oleh Industri di Provinsi Bengkulu
C	Paket Konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri di Bangka Belitung
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
6077.CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
051	Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat
051	Pengelolaan Data dan Informasi
A	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
052	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah/Buku
A	Penerbitan Majalah Ilmiah
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	Gaji Pegawai dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/halaman kantor
B	Pengadaan makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
C	Perawatan Kendaraan Operasional Perkantoran
D	Layanan Kesehatan Pegawai
E	Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran
F	Laporan Daya dan Jasa
G	Operasional Perkantoran dan Pimpinan
6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal
053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
A	Pengadaan Inventaris Operasional Kantor
6042.EBC.954	Layanan Manajemen SDM
051	Pengelolaan/Manajemen SDM
A	Pelaksanaan Penerimaan Calon ASN

No	Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)
B	Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai
C	Sosialisasi Aturan Kepegawaian
6042.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM
A	Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
A	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran
6042.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
051	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP
A	Penerapan SPIP dilingkungan Unit Kerja
B	Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
6042.EBD.965	Layanan Audit Internal
051	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan
A	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian
B	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi
C	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Produk
D	Pelaksanaan manajemen sertifikasi sistem mutu
E	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan
F	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
G	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi SMK3
H	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
6042.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
A	Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja

C. INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkanlah ukuran untuk menentukan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian sasaran tersebut melalui penetapan indikator kinerja. Berikut ini adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja BSPJI Palembang tahun 2023 :

1. **Sasaran strategis** : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.
Indikator Kinerja Utama : Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (5 Persen)
2. **Sasaran strategis** : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
Indikator Kinerja Utama : Peningkatan peran Balai dalam penerapan industry 4.0 dan/atau standardisasi industry
3. **Sasaran strategis** : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri
Indikator Kinerja Utama :
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (40 Persen)
 - Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (15 Persen)
 - Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri (1200 SPK/Order)
 - Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri (20 ruang lingkup)
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (45 Persen)
4. **Sasaran strategis** : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Indikator Kinerja Utama : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (92 Persen)
5. **Sasaran strategis** : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (3.6 indeks)
6. **Sasaran strategis** : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional

Indikator Kinerja Utama : rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks 75)

7. **Sasaran strategis** : Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja Utama : Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks 4,03)

8. **Sasaran strategis** : Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Indikator Kinerja Utama : Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja (Nilai 85)

Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai 90)

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan yang disusun sebagai penjabaran atas rencana jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA BSPJI Palembang. Rencana Kinerja Reviu I Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran rencana jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA BSPJI Palembang TA 2021-2024 Reviu III. Penyusunan target kinerja dalam RENKIN Reviu III. Sedangkan pelaksanaan kegiatan BSPJI Palembang pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen. Target Renkin BSPJI Palembang TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Target Rencana Kinerja TA.2023

No	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	40	Persen
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	15	Persen
		3	Meningkatnya Jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	1200	Order
		4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	20	Ruang Lingkup
		5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	45	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	Persen

No	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan
	Efektif dan Efisien				
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesiona	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	B	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	85	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90	Nilai

Lampiran 1. Matriks Keterkaitan Aktivitas Utama dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kuinerja Kegiatan

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK		Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang								15.539,39	15.231,08	15.083,26	22.335,00	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing												
Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri												
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	1	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/a			117,95	116,73			-
	2	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	kegiatan	3	3			36,03	25,00			Layanan Kerjasama, Layanan Konsultansi, DAPATI, Layanann Pengujian
	3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil	Persen	N/A	N/a	30	35			300,00	450,00	Layanan

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	kegiatan kolaborasi										Pendampingan Konsultansi Pemanfaatan teknologi, DAPAI, LAYanan Pengujian	
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industr	Perusahaan	N/A	1	2	2	N/A	N/A	100,00	175,00	Kegiatan DAPATI dan PINOTI, layanan pendampingan dan konsultansi
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	Persen	30	30	40	45	26,08	55,00	500,00	700,00	Kegiatan DAPATI dan PINOTI, layanan pendampingan

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
												dan konsultasi
2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	persen	10	15	15	15	77,48	122,92	1.268,36	1.850		Layanan pengujian, alyanan kalibrasi, layanan sertifikasi, layanan konsultasi, LPH (Lembaga Penjamin Halal) layanan pelatihan, layanan inspeksi dan verifikasi
3	Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri	SPK/Order			1200	1300			150,00	300,00		Layanan pengujian, alyanan kalibrasi,

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
												layanan sertifikasi, layanan konsultasi, LPH (Lembaga Penjamin Halal) layanan pelatihan, layanan inspeksi dan verifikasi
4	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	15	20	20	25	158,82	1.364,24	458,76	600,00	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK	
5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan	Persen	40	40	45	50	3.209,53	3.808,00	130,00	1.200	Pengadaan inventaris	

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	barang dan jasa										perkantoran dan alat laboratorium, layanan sarnaa/internal	
Program Dukungan Manajemen												
Pengelolaan Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri												
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Peri											
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,7	N/A	27,52	7.931.28	8.700,00	Kejasama, promosi, seminar dan fasilitasi kemitraan layanan jasa
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	1	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	3	3			27,52	33,00			

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	91,5	92	92	93	52,24	71,68	3.818,99	4.565,00	Penerapan Zonta Integritas, penerapan SPIP dan PIKI,
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional											
	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	77	195,56	270,67	209,5	375,00	Nilai Displikn pegawai, peningkatan kompetensi [egawai
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	90			10.129,33	8.996,32			
SK7	Penguatan Layanan Publik											
	1	Nilai Minimal indeks Layanan publik	Indeks	B-	B	B	A-	1.486,79	280,63	50,00	3.000,00	Gaji dan Tunjanga, Manajemen layanan SDM
SK8	Penguatan Akuntabilitas											

Program /Kegiatan	Sasaran Startegis/Sasaran Program/Sasaran kegiatan/IKU/IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalamn ribuan rupiah)				Aktivitas
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Organisasi										
1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	81	83	85	88	1.486,79	280,63	50,00	3.000,00	Penyusunan program perencanaan, pengukuran, Pelaporan dan evaluasi Kinerja
2	Nilai Minimal Lporan Keuangan	Nilai	90	90	90	90	19,94	30,55	35,18	75,00	Layanan SAI, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR BSPJI PALEMBANG

KODE	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	SATUAN	2023	
			TARGET	RP. JUTA
	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang			15.083,26
SK1	Meningkatnya Daya SaMeningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas			
SK.1.3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	30	
A	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis			300.00
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0			
Sk.2.1	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan standardisasi industri	Perusahaan	2	
A	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industri			100.00
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri			
SK.3.1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang Memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	Persen	40	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri			
B	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industr			500.00
SK3.2	Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri (Persen)	Persen	15	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			
B	Sosialisasi Layanan Teknis Pengujian			792,73
C	Pelayanan Teknis Kalibrasi			65,10
D	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			310,53
E	Jasa Pelayanan Teknis			100,00

KODE	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	SATUAN	2023	
			TARGET	RP. JUTA
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri			
SK 3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri	Persen	40	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri			150.00
B	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri			
SK 3.2	Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	Persen	15	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			458.76
B	Pelayanan Teknis Pengujian			792.73
C	Pelayanan Teknis Kalibrasi			65.10
D	Terselenggaranya Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			310.53
E	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			100.00
SK 3.3	Meningkatnya Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri	SPK/Order	1200	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi Jasa			150,00
B	Promosi/publikasi/temu pelanggan/ sosialisasi/ diseminasi standardisasi dan layanan teknis			
SK 3.4	Peningkatan Jumlah Ruang Lingkup Layanan Jasa Industri	Ruang Lingkup	20	
A	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			
B	Akreditasi/surveilance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan			458,76
SK 3.5	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	Persen	45	

KODE	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	SATUAN	2023	
			TARGET	RP. JUTA
A	Layanan Perkantoran BPPI Baristand Industri			
B	Operasional Pemeliharaan Kantor			
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan			100.00
D	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran			30.00
E	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien			
SK 4.2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker (Persen)	Persen	93	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			
B	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			27,21
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3.791,78
SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan			
SK 5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri	Indeks	3.6	
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas / SPIP			
B	Gaji dan Tunjangan			7,931,28
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang professional			
SK 6.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	Indeks	75	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI*			
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM			
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM*			
E	Layanan Manajemen SDM			45.40

KODE	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUBKOMPONEN	SATUAN	2023	
			TARGET	RP. JUTA
F	Layanan Pendidikan dan Pelatihan			150.00
G	Penerbitan Buku dan Majalah			14.10
H	Gaji dan Tunjangan*			
I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*			
SK7	Penguatan Layanan Publik			
SK 7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik (Indeks)	Indeks	B	
A	Pengadaan Kendaraan motor operasional			
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			
C	Pengadaan Peralatan Perkantoran*			
D	Pengelolaan Data dan informasi			50.00
E	Gedung laboratorium/ workshop/layanan yang dibangun/ direnovasi			
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi			
SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	Nilai	85	
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			
B	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			10,40
C	Penyelenggaraan Kearsipan			21,57
SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai)	Nilai	90	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			
B	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			35.18

